

SPEKTRUM PEMIKIRAN: MENYOROT SIKAP POLITIK PEJABAT BERBALUT AGAMA

M. Sidi Ritaudin*

Abstrak

Tanda-tanda atau gejala kepemimpinan yang gagal, dalam perspektif agama (Islam), adalah tidak sinkronnya antara ucapan dengan tindakan yang lazim disebut sebagai munafik, agar tampil prima disegani dan berwibawa, meski bertentangan dengan hati nurani dan membelakangi agama, maka lahirlah politik pencitraan. Tentu saja hal ini merupakan tindakan kamoflase, jika dilakukan oleh aparat atau pejabat, dapat merongrong kewibawaan Negara dan pemerintah. *Leadership* yang baik adalah yang secara substansi menjalankan amanat Sang Pencipta, Penguasa seluruh alam, jadi agama tidak sekedar pembungkus perilaku politik yang buruk dan busuk, seperti korupsi dan keculasan untuk pencitraan, melainkan syari'at agama harus ditegakkan. Negara justru diperlukan untuk mengembangkan agama guna memakmurkan bumi secara keseluruhan.

Kata Kunci : Sikap Politik, Pejabat, Agama

Pendahuluan

Politik pencitraan adalah *symptom* pembungkusan borok-borok kemunafikan dalam tindakan politik yang tidak memihak, terutama terhadap penderitaan rakyat, keadilan dan kebenaran. Semua tindakan dilakukan dengan penuh kepura-puraan. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh elit penguasa yang inkonsisten dengan kontrak politik yang ia sepakati dengan rakyat sebelum ia naik tahta sebagai pemegang amanah. Orang yang lupa, linglung biasanya karena telah mabuk alias gila hormat, gede rumongso, hingga tidak saja alpa pada

* Alumni Sekolah Pascasarjana UIN Syahida Jakarta adalah Dosen IAIN Raden Intan Lampung bidang ilmu Pemikiran Islam dengan homebasic di Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin.

M. Sidi Ritaudin: SPEKTRUM PEMIKIRAN.....

janji dengan rakyat tapi juga lupa pada misi *kekhalifahan*-nya sebagai manusia yang harus mengabdikan kepada Sang Pencipta.

Bukti kealpaannya tersebut adalah bahwa antara perkataan dan perbuatannya sudah tidak selaras alias munafik, terma-terma agama dan sikap keberagamaannya tidak lebih hanya sebagai pembalut keserakahan, kebengisan dan ketamakan yang telah menguasai waduk jasmani, jiwa dan pikirannya yang diperuntukkan bagi sifat-sifat iblis dan binatang, bahkan lebih jahat dari itu, sebab binatang tidak pernah mengambil lebih dari besaran perutnya, ia hanya memikirkan apa yang harus dimakan untuk hari ini demi kelangsungan hidupnya, tetapi bagi orang yang serakah, tamak dan loba telah mengambil lebih dari hak-haknya untuk hidup tujuh generasi di bawahnya, benar-benar kekuasaan dimanfaatkan demi meraih uang dan harta bahkan wanita dengan menghalalkan segala cara, *na'udzubillah min dzalik !!!*

Gambaran di atas jelas menunjukkan pemimpin yang tidak mengerti tugas pokok dan fungsi(tupoksi)-nya, maka harus introspeksi dan memahami bahwa tujuan Negara, yang harus direalisasikan oleh seorang pemimpin beserta stafnya dan bawahannya adalah untuk memelihara keamanan dan integritas Negara, menjaga hukum dan ketertiban, dan untuk memajukan negeri hingga setiap individu dalam negeri itu dapat mengembangkan dan merealisasikan seluruh potensi yang ada padanya sambil memberikan sumbangsuhnya bagi kesejahteraan semua.¹

Seorang pemimpin yang tidak ambisius dan takut akan fitnah serta benar-benar melihat posisi pemimpin sebagai amanah, ketika gagal dalam mengemban amanah kepemimpinan sebaiknya segera mengundurkan diri, jangan mempertahankan posisi yang telah

¹Lihat, Fazlur Rahman, "The Islamic Concept of Satae", dalam John J. Donuhue and John L. Esposito (eds.), *Islam in Transition : Muslim Perspective*, (New York : Oxford University Press, 1982), h. 261-262.

M. Sidi Ritaudin: SPEKTRUM PEMIKIRAN.....

diduduki dengan kemunafikan, dengan melakukan pencitraan untuk membungkus ketidakmampuannya dalam memimpin, yang dilihat hanya gaji dan tunjangan serta fasilitas Negara, serta kehormatan dan kemuliaan menjadi seorang pemimpin. Ingat !!! tanggung jawab seorang pemimpin akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt di akhirat kelak. Semua manusia akan mati, tidak terkecuali sang pemimpin.²

Elit politik jangan sekali-kali membohongi rakyat, karena elit politik merupakan penyelenggara Negara tentunya posisinya adalah pihak yang paling banyak dimintai tanggung jawab, dalam hal ini elit politik dipercaya untuk menjadi wakil rakyat (baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif) dalam memenuhi kebutuhan publik. Oleh karenanya posisi startegis sangat menentukan kelangsungan Negara. Baik buruknya Negara di masa depan bergantung kepada baik buruknya elite politik. Tuntutan terhadap elite politik sebagai publik figur harus mampu tidak saja memberikan contoh tetapi mampu menjadi contoh dalam tindakan konkrit bagai seluruh masyarakat dan warga Negara.³

²Terkait dengan prinsip ini, lihat saja misalnya para Nabi, yang kekuasaannya langsung diberikan Tuhan kepadanya, Rasulullah Saw dan para Khalifah sesudahnya hingga para khalifah di masa Mu'awiyah dan Abasiyah, raja Fir'un, bahkan Qarun yang dikisahkan memiliki kekayaan luar biasa, semuanya telah mati dan hanya membawa kain kafan memasuki kuburan 1 x2 meter. Di era modern sebut saja misalnya Saddam Husein, Soekarno, Kim Yung Il, Muammar Ghadafi, Soeharto, semuanya sirna. Kekuasaan itu hanya bersifat sementara, tidak abadi, oleh karena itu, ingatlah akan mati, sehingga dapat melaksanakan kepemimpinan yang abdi dan amanah.

³Bandingkan dengan ulasan Firman Subagyo, *Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, (Jakarta : RMBOOKS PT. Wahana Semesta Intermedia, 2009), h. 104. Dalam Islam, akses menjadikan pemimpin sebagai suri tauladan terdapat dalam Q.S *al Ahzab* : 21. *Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*. Oleh karena itu sangat relevan jika seorang pemimpin itu menata sikap sebagaimana karakter Rasulullah Saw, yaitu *sidiq* (Jujur), *amanah* (dapat dipercaya/ akuntabel), *fathonah* (cerdas, transparan) dan *tabligh* (menyampaikan) dalam arti tidak ada yang keluar dari mulut seorang pemimpin kecuali kebenaran.

Dampak Sikap Politik Pejabat Plin-Plan

Para teoritikus politik menyuarakan nada yang sama bahwa seorang *leader* itu (apalagi kepala Negara) harus bersikap tegas, tidak boleh plin plan, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, cepat, tepat dan cerdas merupakan persyaratan yang harus melekat, dengan kata lain memiliki integritas kepribadian yang tangguh, tidak cengeng, melainkan memiliki visi yang jauh ke depan, bahkan berpikir hingga beberapa generasi mendatang. Seorang pejabat itu harus memiliki meritokrasi atau keahlian. Sebagai ruh dari spektrum pemikiran, maka dapat diakses bagaimana Rasulullah Saw (sebagai Kepala Negara) selalu memberikan jabatan kepada orang yang ahli, bukan kepada orang yang berambisi tetapi tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang jabatannya itu.⁴

Kriteria pejabat atau pemimpin yang baik dapat dianalogikan sebagai pekerja keras yang disinyalir dalam al-Qur'an, yaitu firman Allah berikut : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. *Al-Qashash/* 28 : 26). Pada umumnya, orang mengartikan kata *al-Qawiyyu* dan *al-Amin* dengan kekuatan fisik dan amanah atau jujur. Oleh karena itu, sebaik-baik orang yang dapat diangkat sebagai pejabat adalah orang yang memadukan kedua sifat tersebut, yaitu kemampuan mengerjakan tugas dan amanah.

⁴Abdul Ghafar, Aziz, *Berpolitik untuk Agama Misi Islam, Kristen dan Yahudi tentang Politik*, Terj. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, h. 53.

M. Sidi Ritaudin: SPEKTRUM PEMIKIRAN.....

Kekuatan fisik seorang pejabat hendaklah ditopang oleh kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sabda Nabi telah mengisyaratkan bahwa untuk mencapai kesuksesan di dunia atau di akherat haruslah dengan ilmu, bahkan untuk sukses meraih keduanya juga dengan ilmu. Maka di era modern sekarang ini tidak cukup hanya kuat fisiknya saja, badan seperti kerbau tapi otaknya otak udang, pasti akan menyeret rakyatnya ke lembah kehancuran. Apa lagi jika kerbaunya adalah kerbau yang rakus. Tentu saja pejabat sekarang ini hendaklah memperkuat kemampuan di bidang ilmu dan manajerial di samping kejujuran dan amanah.⁵

Manakala sang pemimpin atau sang pejabat di suatu pemerintahan atau Negara luput dari karakteristik tersebut, maka jelas dia tidak akan mampu berlaku amanah, maka benar apa yang ditengarai oleh ahli pikir Muslim bahwa “jika satu urusan diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi, tunggu saja kehancurannya !” dengan demikian, cukup jelas bahwa pemimpin yang tidak tegas atau plin plan adalah pemimpin yang lembek, tidak kompeten, tidak memiliki integritas dan oleh karenanya dapat menyebabkan kehancuran suatu negeri. Ekses yang paling nyata adalah kekacauan politik, ekonomi morat-marit, system keuangan berantakan, keamanan atau integrasi bangsa terancam, pejabat menjadi maling bahkan rampok, situasi tidak menentu, aparat pemerintah tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

⁵Mengingat posisi pemimpin dalam suatu Negara sangat strategis dan memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat berat, Muhammad Rasyid Ridha memiliki konsep bahwa harus ada pendidikan calon Khalifah alias pemimpin umat, lihat Mukhotob Hamzah, *Menjadi Politisi Islami (Fikih Politik)*, h. 42.

M. Sidi Ritaudin: SPEKTRUM PEMIKIRAN.....

Kepercayaan publik akan semakin menguat terhadap pejabat pemerintah atau penguasa manakala janji-janji politik sebagai kontrak dan perjanjian untuk ditaati benar-benar direalisasikan dalam kehidupan nyata. Menurut Ibn Khaldun, kontrak politik berupa janji setia ini harus dipahami, setiap orang harus mengetahuinya, karena ia menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh (raja dan imam) alias para pemimpin dan pejabat, di mana tindakannya tidak akan sia-sia atau percuma. Hal ini akan member pertimbangan akan kepatuhan terhadap para penguasa.⁶ Tuntutan politik terhadap kontrak politik dalam pemilu presiden, pemilu kepala daerah (pilkada), pemilu legislative ditakar dari kampanye dan debat publik sebelum pelaksanaan pemilu. Hal ini hendaknya dijadikan acuan dalam melaksanakan pemerintahan. Ironinya, janji tinggal janji, bahkan dilupakan begitu saja, hal inilah yang menimbulkan kemarahan publik dan menyebabkan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan para pejabat yang munafik.

Berkembangnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah jelas merupakan penyebab terjadinya konflik horizontal, terjadi perpecahan antar partai, antar pejabat, antar penguasa, bahkan antara rakyat dengan pemerintah secara vertikal. Menurut Ibn Khaldun, bahwa yang nampak pertama kali dari konsekuensi kelemahan Negara ialah perpecahannya.⁷ Mendukung pendapat ini, Sayyid Quthb berpendapat bahwa secara teoritis pemikiran politik Islam

⁶Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, h. 258-259.

⁷Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000, h. 368.

M. Sidi Ritaudin: SPEKTRUM PEMIKIRAN.....

meniscayakan adanya ketaatan rakyat terhadap penguasa,⁸ agar terjadi stabilitas sosial dan stabilitas pemerintahan. Stabilitas ini tidak mungkin terwujud jika rakyat tidak diperhatikan, mereka lapar dan termarginalkan, baik dari aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sehingga bermunculan masalah-masalah sosial yang dapat memicu konflik horizontal dan vertikal, maka pada akhirnya Negara kacau di manana, dan ini merupakan pertanda akan dating kehancuran dan tumbangnya sebuah rezim kekuasaan.

Konsepsi mendasar, sebelum ketaatan rakyat kepada penguasa, adalah persoalan keadilan penguasa, karena berlaku adil merupakan perintah syar'i⁹. secara ideologis, keadilan merupakan persoalan mendasar dalam prinsip *leadership*. Karena persoalan ini merupakan masalah kenegaraan yang paling pelik. Kalau dalam poligami saja yang menjadi kata kunci kebolehan adalah keadilan, dan hamper-hampir tidak dapat dilakukan oleh manusia, yang hanya member keadilan pada istri-istri, maka memberikan keadilan kepada rakyat yang majemuk terdiri dari berbagai etnis, bahasa, warna kulit dan pulau-pulau seperti Indonesia, maka prinsip ini jika tidak secara benar-benar dilaksanakan, maka bias saja mencuat kepermukaan sebagai pemicu ketegangan sosial dan ketegangan politik yang berujung pada disintegrasi bangsa dan kehancuran NKRI yang di bumi persada ini.

⁸Sayyid Quthb mengutip ayat al-Qur'an surat al-Nisa'/4: 59 : 59. *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

⁹Lihat Q.S *al-Nahl* : 90, *al-Nisa'* : 58, *al-An'am* : 152 dan *al-Ma'idah* : 8. Tentang urgensi ketaatan kepada penguasa yang bagaimana lihat pemaparan Sayyid Quthb lebih luas dalam bukunya, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, (Baeirut, Kairo, Dar al-Syuruq, 1983). h. 131.

Agama Sebagai Pembungkus Kebejatan Politik

Wajah agama yang berfungsi sebagai rahmat bagi semesta alam sering kali dibopengkan oleh “segelintir” pejabat dengan menyalahartafsirkan agama demi memenuhi ego pribadi dalam memenuhi hedonisme kekuasaan politik. Haryatmoko mengidentifikasi tiga peran agama yang rentan “diselewengkan” oleh pemeluknya, *pertama*, peran agama sebagai ideologi, yang sering kali beda penafsiran yang dapat menjurus kepada konflik sosial dan dapat menjadi amunisi pemicu kekacauan publik, terutama yang terkait dengan masalah kekuasaan dan ketidakadilan penguasa.

Kedua, agama berperan sebagai faktor identitas yang dapat memberikan perdamaian, status sosial, pandangan hidup dan etos tertentu, sekaligus menjadi identitas harga diri, martabat dan kebanggaan. Identitas agama ini bisa menyulut dan berubah menjadi pemicu konflik antar agama. *Ketiga*, agama berperan menjadi legitimasi etis hubungan sosial. Hal ini bukan berarti merupakan sakralisasi hubungan sosial secara horizontal, melainkan agama berperan sebagai alat legitimasi hubungan sosial.¹⁰

Apa yang telah disinyalir oleh Haryatmoko tersebut, agaknya tidak berlebihan dan diangkat dari realitas kehidupan masyarakat. Legitimasi agama nampaknya masih menjadi primadona para politisi, penguasa dan para pejabat dalam upaya merebut dan melanggengkan kekuasaannya. Menjadi faktor pemicu konflik, karena antara apa yang disampaikan kepada publik, berupa janji-janji politik yang sering ditandakan pada ayat-ayat atau sumber-sumber agama

¹⁰Lihat uraian yang lebih komprehensif yang dipaparkan oleh Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2004), h. 65-66.

M. Sidi Ritaudin: SPEKTRUM PEMIKIRAN.....

ternyata dalam kenyataannya tidak pernah terrealisir. Hal inilah yang dilihat oleh publik bahwa agama hanya diposisikan sebagai pembungkus nafsu dan syahwat politik segelintir pejabat belaka.

Triumphalisme nilai agama ditafsirkan sebagai bentuk perendahan martabat terhadap suatu kelompok sosial. Penghayatan agama hanya berfokus pada simbol-simbol, umpamanya setiap pelantikan pimpinan diadakan sumpah jabatan, tetapi kehilangan momentum ketika pejabat tersebut melakukan tindakan korupsi. Hatinurani yang menjadi barometer agama tidak didengar lagi. Apa lagi sumpah jabatan, sudah masuk dalam kotak sampah.

Kebejatan politik yang paling krusial adalah pejabat atau pemerintah atau pemimpin yang melakukan tindakan korupsi dan melaksanakan ketidakadilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ajaran Islam memberi jaminan kepada orang-orang yang mengaku Muslim, pasti tidak akan melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Karena sabda Nabi sangat jelas bahwa tidak mungkin seorang maling itu melakukan tindakan maling, ketika ia maling ia adalah seorang Muslim. Hal ini menegaskan bahwa orang yang maling, rampok dan korup itu tidak mungkin muslim. Kalau dia mengaku muslim berarti ia adalah orang yang murtad yang tidak mempercayai Islam, oleh karenanya pantas disebut kafir atau paling tidak munafik. Begitu pula pejabat yang tidak adil, pasti bukan muslim, sebab kalau ia benar-benar muslim maka pasti ia tau bahwa al-Qur'an mengajarkan agar senantiasa berlaku adil,¹¹ dan perbuatan itu merupakan dosa.

¹¹Lihat catatan kaki nomor enam, atau Q.S *al-Nahl* : 90, *al-Nisa'* : 58, *al-An'am* : 152 dan *al-Ma'idah* : 8. Seorang pemikir politik Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin yang cacat dalam keadilannya harus mundur dari jabatannya sebagai pemimpin. Lihat, Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Terj. Fadhli Bahri, (Jakarta : Darul Falah, 2000), h. 26. M. Quraish Shihab bahkan mengatakan bahwa keadilan akan menghantarkan kepada ketakwaan dan ketakwaan menghasilkan kesejahteraan.. Lihat, Q.S. *al-Ma'idah* : 8, *al-A'raf* : 96 dan *Nuh*: 10-12. Lihat, M. Quraish Shihab,

Urgensi Manifesto Politik sebagai Acuan Moral Politik

Sebaik apa pun suatu sistem, jika pelaksanaannya “bejat”, maka proses yang terjadi akan memproduksi hasil yang tidak baik, yaitu kejahatan politik merajalela dan terjadi di mana, di semua sisi kehidupan. Sebaliknya, meskipun sistemnya kurang bagus tetapi pelaksanaannya amanah, jujur dan kompeten di bidangnya maka masih bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Oleh karena itu integritas sumber pemimpin menjadi penting, dalam terminologi politik dikenal kata-kata *the man behind the gun*. Harapan masyarakat, negeri adil makmur, sejahtera dan sentosa akan terwujud jika sistemnya baik, pelaksanaannya baik sumberdaya manusianya berkualitas.

Tahapan politik untuk membentengi manusia dari nafsu serakah dan syahwat politik yang menyimpang, maka tidak cukup dengan komitmen pribadi, tidak bias diukur hanya dari sisi kopiah hajinya, atau gelar akademiknya saja, melainkan melakukan manifesto politik. Jika kampanye dan debat publik dilaksanakan sebelum pemilihan, maka manifesto politik disampaikan kepada publik suatu pernyataan terbuka tentang visi dan misi politiknya yang siap dipertanggung-jawabkan di hadapan publik.

Menarik dikemukakan di sini petikan manifesto politik Abu Bakar ash-Shiddiq berikut ini, ia berdiri seraya memuji Allah Swt dan menyatakan sukurnya, kemudian dia berkata :

*“Amma ba’du; Wahai manusia ! Sesungguhnya saya telah dipilih untuk memimpin kalian dan **bukanlah saya orang***

Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung : Mizan, 1997), h. 111

*terbaik di antara kalian. Maka, jika saya melakukan hal yang baik, bantulah saya, dan jika saya melakukan tindakan yang menyeleweng turunkanlah saya. Sebab **kebenaran** itu adalah **amanah**, sedangkan **kebohongan** itu adalah **pengkhianatan**. Orang-orang yang **lemah** di antara kalian adalah kuat dalam pandangan saya hingga saya ambikan hak-haknya untuknya, sedangkan orang yang **kuat** di antara kalian adalah lemah di hadapanku hingga saya ambil hak orang lain darinya, insya Allah, dan tidak ada satu kaum pun yang meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali akan Allah timpakan kepadanya kehinaan, dan tidak pula menyebar kemaksiatan kepada suatu kaum kecuali akan Allah timpakan kepada mereka petaka. **Taatlah kalian kepadaku selama saya taat kepada Allah, dan jika saya melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban taat kalian kepadaku. Bangunlah untuk melakukan shalat rahimakumullah.**"¹²*

Untaian redaksi manifesto politik Abu Bakar ini, jika dicermati secara mendalam akan memperlihatkan kedalaman hati penuturnya, terlihat dia bukan orangnya yang ambisius terhadap jabatan politik, ia tidak pernah ambisi terhadap kekuasaan, dan ia pun tidak memintanya kepada Allah karena ia sangat khawatir akan terjadi fitnah. Oleh sebab ia memandang jabatan pemimpin itu sebagai amanah, maka ia tidak sedetik pun berleha-leha, melainkan senantiasa memikirkan dan bertindak demi rakyat yang dipimpinya.

Patut bahkan harus diambil teladan dri manifesto politik tersebut antara lain; rendah hati, tidak sombong sebagai pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinya. Bahwa Abu Bakar adalah sahabat Rasul yang paling baik diakui oleh semua sahabat dan rasul serta kaum ulama, tetapi ia tetap menyatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang terbaik, sehingga dengan segala kerendahan hatinya ia

¹²Lihat Imam As Suyuthi, *Tarikh Khulafa' Sejarah Penguasa Islam, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas*, Terj. Samson Rahman, Editor, Imam Sulaiman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 75.

M. Sidi Ritaudin: SPEKTRUM PEMIKIRAN.....

menyatakan siap dikritik dan siap dilengserkan jika ia melakukan kesalahan terhadap perintah agama. Baginya kebenaran itu adalah amanah dan kebohongan merupakan pengkhianatan. Prinsip ini seharusnya dipegang oleh setiap pemimpin kemudian menegakkan keadilan dengan membela hak-hak kaum lemah dan menata kehidupan ekonomi para konglomerat. Puncaknya adalah pernyataan bahwa rakyat wajib menaati pemimpin selama pemimpin tersebut taat kepada Allah dan rasulnya, jika ia melakukan kebohongan dan pengkhianatan maka ia siap dilengserkan.

Moral politik yang paling tangguh adalah moral yang dilandasi syari'ah, yaitu sebagaimana dipegang oleh Abu bakar, bahwa pemimpin itu haruslah menjadi teladan dan secara teguh melaksanakan perintah Tuhan dan Rasul-Nya. Nizam dan al-Ghazali menandakan bahwa fondasi Negara dan dasar kewenangan terletak pada pelaksanaan hukum Tuhan.. dan teladan yang diberikan untuk mengangkat panji-panji agama serta penegakan kembali praktik syari'ah dalam nega.¹³

Ulasan Bernard Lewis yang mengakui bahwa posisi para nabi sebagai pemimpin umat, yang juga patut diakses oleh para pemimpin masa kini, adalah kekuatan dan kekuasaan merupakan amanah langsung dari Tuhan, di mana Dia telah mewajibkan umat manusia untuk tunduk kepada dua kekuatan, yaitu kekuatan Tuhan dan kekuatan para pemimpin, serta harus mengakui jalan kebenaran yang telah

¹³Lihat, Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 213.

M. Sidi Ritaudin: SPEKTRUM PEMIKIRAN.....

dibentangkan oleh Tuhan.¹⁴ Oleh karena itulah kiranya para pemikir politik kontemporer seperti Al-Ghazali, Al-Maududi, Sayyid Quthb, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh dan lain-lain sepakat bahwa ketaatan kepada pemimpin oleh rakyatnya merupakan keniscayaan, selama sang pemimpin taat kepada perintah Tuhan dan rasul-Nya.

Penutup

Otoritas politik yang diemban manusia bersifat sementara, tidak abadi, dan merupakan sifat bawaan manusia. Oleh karena itu harus ada hukum yang mengendalikan politik, maka hukum lebih utama dibanding jabatan dan diakui secara universal bahwa pemimpin berada di bawah hukum yang tidak dapat dibantah, sehingga banyak sekali para pemimpin Negara yang zalim di dunia yang melampaui hukum diseret ke penjara. Hukum yang absolute adalah hukum Allah, maka teori kedaulatan versi Hobbes atau Marsilia tertolak dengan sendirinya. Kedaulatan ada di tangan Allah yang didelegasikan sebahagiannya kepada manusia sebagai ulil amri (pemimpin) bangsa atau Negara. Agama tidak boleh dijadikan alat legitimasi kekuasaan, sebaliknya Negara merupakan fasilitas untuk menegakkan syari'ah Allah dalam kehidupan manusia sehingga tercipta suatu masyarakat yang sejahtera, damai dan sentosa dalam bingkai Negara yang dipimpin oleh penguasa yang adil dan amanah..

Daftar Pustaka

Aziz, Abdul Ghafar, *Berpolitik untuk Agama Misi Islam, Kristen dan Yahudi tentang Politik*, Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

¹⁴Lihat Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chicago : University of Chicago Press, 1988), h. 134.

M. Sidi Ritaudin: SPEKTRUM PEMIKIRAN.....

- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Hamzah, Mukhotob, *Menjadi Politisi Islami (Fikih Politik)*, Yogyakarta : Gama Media, 2004.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000.
- Lewis, Bernard, *The Political Language of Islam*, Chicago : University of Chicago Press, 1988.
- Mawardi, Imam Al-, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Terj. Fadhli Bahri, Jakarta : Darul Falah, 2000.
- Quthb, Sayyid, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, Baerut, Kairo, Dar al-Syuruq, 1983.
- Rahman, Fazlur, "The Islamic Concept of Satae", dalam John J. Donuhue and John L. Esposito (eds.), *Islam in Transition : Muslim Perspective*, New York : Oxford University Press, 1982.
- Shihab, M. Quraish *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1997.
- Subagyo, Firman, *Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, Jakarta : RMBOOKS PT. Wahana Semesta Intermedia, 2009.
- Suyuthi, Imam As-, *Tarikh Khulafa' Sejarah Penguasa Islam, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas*, Terj. Samson Rahman, Editor, Imam Sulaiman, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005.